

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa:

Saat ini Indonesia dihadapi dengan permasalahan diskriminasi terhadap ODHA yang masih banyak terjadi dalam proses penerimaan kerja, hal ini didasari karena tidak ada regulasi spesifik dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang melarang diskriminasi berdasarkan kesehatan. Walaupun sudah ada peraturan yang mengatur mengenai larangan diskriminasi berdasarkan HIV, perlu diingat peraturan ini merupakan peraturan yang memiliki fokus pada bidang kesehatan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual bertujuan untuk menghapus stigma dan diskriminasi terhadap ODHA di bidang kesehatan seperti keterbukaan terhadap layanan akses kesehatan dan bukan peraturan yang mengatur mengenai diskriminasi di bidang ketenagakerjaan untuk calon pekerja ODHA karena saat ini masih banyak calon pekerja ODHA yang mendapatkan diskriminasi karena belum ada pengaturan yang secara afirmatif mengatur mengenai larangan diskriminasi kepada calon pekerja berdasarkan alasan kesehatan. Walaupun sudah ada pengaturan internasional seperti ICESCR yang mewajibkan setiap negara untuk mengakui hak untuk pekerjaan dan di dalam Naskah Rekomendasi tentang HIV dan AIDS dan Dunia Kerja, 2010 (No.200) Pasal 3 huruf (c) mengenai prinsip umum yang harus diterapkan pada seluruh tindakan yang terlibat di dalam tanggapan nasional terhadap HIV dan AIDS di dunia kerja yang menyebutkan tidak boleh ada diskriminasi terhadap atau stigmatisasi pekerja, terutama pencari kerja dan pelamar kerja. Pasal 10 Rekomendasi ini juga menyebutkan status HIV yang nyata tidak boleh menjadi dasar diskriminasi yang mencegah perekrutan yang sesuai dengan ketentuan konvensi mengenai Diskriminasi (pekerjaan dan jabatan), 1958. Pada kenyataannya meskipun sudah ada pengaturan yang melarang tindakan larangan diskriminasi terhadap calon pekerja dengan HIV/AIDS, masih banyak pelanggaran yang terjadi dengan melakukan diskriminasi kepada ODHA sehingga

ODHA tidak dapat memenuhi haknya untuk mendapatkan pekerjaan, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang diskriminasi berdasarkan alasan kesehatan, maka perlu adanya sanksi dan penegakan yang tegas untuk memperjelas bahwa tindakan diskriminasi berdasarkan alasan kesehatan merupakan tindakan yang dilarang khususnya dalam proses mencari pekerjaan.

Penulis berpendapat, perlindungan hukum bagi ODHA di Indonesia masih belum memadai yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Perlindungan terhadap hak untuk bekerja bagi ODHA perlu diperkuat melalui regulasi yang lebih spesifik dan tegas untuk memastikan tidak adanya diskriminasi dan menghapus ketidakpastian hukum yang ada berdasarkan kondisi kesehatan. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki ketidakpastian hukum yang ada, termasuk dengan membuat regulasi baru atau memperjelas regulasi yang ada untuk memberikan perlindungan yang nyata bagi ODHA di level undang-undang karena permasalahan ini menyangkut hak asasi manusia ODHA untuk diberlakukan sama tanpa melihat latar belakang apapun khususnya yang menyangkut kesehatan. Perlindungan kepada ODHA juga dapat dikeluarkan dengan menggunakan PERPPU, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau menggunakan Peraturan Mahkamah Agung untuk mengatur perilaku hakim agar jika terjadi sengketa terkait dengan penolakan calon pekerja ODHA, hakim sebagai ujung tombak peradilan dapat menggunakan Peraturan Mahkamah Agung untuk memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung tersebut bahwa diskriminasi di dalam lingkup ketenagakerjaan mencakup diskriminasi berdasarkan kesehatan khususnya penyakit HIV/AIDS. Pengawasan dan penegakan hukum harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan kesempatan kerja yang sama tanpa diskriminasi sesuai dengan amanat Konstitusi. Berdasarkan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Konvensi ILO tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) dan ICESCR, setiap orang memiliki hak yang sama untuk mencari nafkah. Indonesia perlu menyelaraskan regulasi nasional dengan standar internasional untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia agar setiap orang mendapatkan pekerjaan dalam konteks ketenagakerjaan. Diskriminasi terhadap ODHA dalam penerimaan kerja

merupakan masalah serius yang perlu segera diatasi, dibutuhkan regulasi yang lebih jelas dan tegas serta peningkatan kesadaran dan penegakan hukum untuk memastikan hak setiap individu untuk mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan adil bagi semua warga negara, termasuk ODHA. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak untuk bekerja bagi setiap individu tanpa memandang kondisi kesehatannya.

## **5.2 Saran**

- Pemerintah:

Pemerintah melalui lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif perlu mengeluarkan peraturan khusus yang melarang diskriminasi terhadap calon pekerja berdasarkan alasan kesehatan, terutama HIV/AIDS. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi ODHA. Peraturan yang ada harus diikuti dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan oleh perusahaan dan pemberi kerja. Sanksi yang jelas dan tegas harus diterapkan bagi pihak yang melanggar. Peraturan mengenai permasalahan hak asasi manusia perlu diatur melalui undang-undang yang berlaku secara nasional. Pemerintah dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang nantinya diubah menjadi undang-undang berdasarkan hak prerogatif dan penilaian dari presiden mengenai permasalahan yang ada dan penulis berpendapat tidak ada salahnya presiden mengeluarkan PERPPU karena permasalahan yang ada merupakan permasalahan yang hingga saat ini belum memiliki kepastian dalam pengaturannya. Penulis berpendapat, jika hal ini perlu diperbaiki oleh lembaga legislatif dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat, maka perlu dilakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya di dalam Pasal 5 yang mengatur mengenai larangan diskriminasi. Peraturan yang nantinya mendapatkan pembaharuan perlu diperjelas mengenai apa saja kategori yang tidak boleh didiskriminasi bagi setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan serta ditambahkan di dalam bagian

penjelasan pasal bahwa kesehatan yang dimaksud merupakan kesehatan yang berkaitan dengan HIV/AIDS yang sering mendapatkan stigmatisasi negatif di kalangan masyarakat dan pekerjaan apa saja yang harus didiskriminasi bagi ODHA dengan alasan pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang rentan menularkan HIV seperti dokter, tenaga kesehatan, dan terapis. Sebagai bahan pertimbangan, di dalam penjelasan pasal 5 sudah diatur mengenai larangan diskriminasi terhadap orang dengan disabilitas dan hal ini juga dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk keadaan saat ini untuk memperjelas diskriminasi yang terjadi kepada ODHA.

Pada lingkup lembaga eksekutif, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dapat mengeluarkan peraturan menteri ketenagakerjaan yang secara spesifik membahas mengenai larangan diskriminasi yang berlaku di dalam lingkup ketenagakerjaan sehingga larangan diskriminasi berdasarkan alasan kesehatan memiliki titik terang dan kekuatan hukum yang jelas bagi ODHA. Walaupun sudah ada pengaturan yang melarang mengenai HIV/AIDS di tempat kerja melalui Keputusan Menteri Tenaga dan Transmigrasi Nomor KEP. 68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja rumusan pasal yang ada di dalamnya tidak mengatur mengenai larangan diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan kepada calon pekerja karena peraturan tersebut lebih mengatur cara atau upaya pencegahan HIV/AIDS di Tempat Kerja saat sudah ada hubungan kerja. Dalam keadaan mendesak untuk menanggulangi ketidakpastian hukum yang ada, peran lembaga yudikatif juga dapat menjadi solusi tercepat untuk memberikan kepastian kepada calon pekerja ODHA dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur perilaku hakim agar hakim di dalam lingkup peradilan dapat menyadari bahwa diskriminasi di dalam lingkup ketenagakerjaan mencakup diskriminasi berdasarkan kesehatan khususnya penyakit HIV/AIDS.

- Perusahaan:

Perusahaan perlu mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan non-diskriminasi yang melindungi hak-hak ODHA. Pelatihan dan sosialisasi mengenai HIV/AIDS harus dilakukan untuk mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman. Seluruh pihak khususnya masyarakat harus terus

mengadvokasi hak-hak ODHA dan memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai HIV/AIDS. Kampanye kesadaran publik perlu ditingkatkan untuk mengurangi stigma sosial. Dukungan dan bantuan hukum dapat memberikan dukungan dan bantuan hukum kepada ODHA yang mengalami diskriminasi dalam penerimaan kerja. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan layanan konsultasi hukum gratis atau pendampingan dalam kasus hukum. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji berbagai aspek diskriminasi terhadap ODHA dalam berbagai sektor pekerjaan. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk advokasi kebijakan yang lebih efektif. Hasil penelitian harus dipublikasikan dan didiskusikan dalam forum ilmiah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai isu ini di kalangan akademisi dan pembuat kebijakan. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam bentuk kemitraan tripartit untuk menangani masalah HIV/AIDS di tempat kerja. Contoh positif dari kemitraan ini adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP. 68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja, meskipun perlu diperluas cakupannya. Mengadopsi dan mengharmonisasikan peraturan regional seperti Peraturan Daerah Jawa Barat dan DKI Jakarta tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS dengan kebijakan nasional untuk memastikan konsistensi dan efektivitas dalam penerapannya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan diskriminasi terhadap ODHA dalam dunia kerja dapat diminimalisir, sehingga ODHA dapat memperoleh kesempatan yang adil dan setara dalam mencari pekerjaan dan menjalani kehidupan yang produktif.

- **Penggiat Hak Asasi Manusia:**

Penggiat hak asasi manusia seharusnya lebih mulai sadar bahwa dalam situasi saat ini, diskriminasi bukan hanya berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan tetapi sudah mulai meluas dengan bukti banyaknya tindakan diskriminasi berdasarkan alasan kesehatan. Diperlukan edukasi nyata dari penggiat hak asasi manusia dengan badan ataupun lembaga terkait mengenai tindakan diskriminasi yang sudah meluas dan menyangkut masalah kesehatan seseorang. Hal ini diperlukan karena dengan adanya tindakan diskriminasi yang ada, seseorang dengan HIV/AIDS tidak dapat memenuhi hak dasarnya sebagai

manusia seperti yang diatur dalam konstitusi yang salah satunya menyangkut permasalahan ketenagakerjaan agar seseorang mendapatkan pekerjaan yang layak dan dapat melanjutkan kehidupannya melalui pekerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 39
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 41
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome*, dan Infeksi Menular Seksual
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 5
- Peraturan Daerah Provinsi tepatnya pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 12 SERI E

### KONVENSI INTERNASIONAL

- Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial  
Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958
- Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial  
Naskah Rekomendasi ILO No. 200 tentang HIV dan AIDS dan Dunia Kerja, 2010 (No.200)

### JURNAL

- Handoko, T. Hani. 2008. Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Y. T. Gunawan, I. Prasetyowati, and M. Ririanty, "Hubungan Karakteristik ODHA Dengan Kejadian Loss to Follow Up Terapi ARV Di Kabupaten Jember," J. IKESMA, vol. 12, no. 1, pp. 53–64.
- Doni Roma Dona, dkk Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja  
<https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI/article/download/3308/314> diakses pada 06 07 Agustus 2023
- Daffa Arya Prayoga, dkk, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional" Volume 2, 2023
- Berita Kedokteran Masyarakat Vol. 25, No. 4 Desember 2009 Hubungan Pengathuan Tentang HIV/AIDS dengan Stigma Orang Dengan HIV/AIDS di Kalangan Pelajar SMA

## BUKU

- Hardijan Rusli (2011), *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Ghalia Indonesia, Bogor. Hlm 7
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji (2003), *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 13.
- Dr. Tedi Priatna (2017), *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV. Insan Mandiri), hlm. 2
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesiam Jakarta, 1983, hlm.64
- Ni Putu Candra Pastua Dewi, PKN dan Pancasila, 2020
- Konsep negara hukum dalam tradisi Anglo Amerika yang dikembangkan dan dipelopori oleh A.V. Dicey, lihat dalam Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara.*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.3
- Jauhariah, "Dinamika Hukum & HAM", Jakarta: Cintya Press, 2016, hlm. 79-80
- Libertus Jehani, *Hak-Hak Pekerja Bila di PHK*, (Tangerang: Visi Media, 2006), hlm 1
- Iman Soepomo (selanjutnya ditulis Imam Soepomo I), *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djembatan, Jakarta, 1992, hlm. 3. Lihat juga Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 2
- G. Karta Sapoetra dan Reince Indraningsih, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Armico, Bandung, 1982, hlm. 2.
- Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi*, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010, hlm. 34
- R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang ", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194
- Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, *dkk Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Rajagrafindo Persada,Depok, 2014, hlm. 27
- R. Joni Bambang S., S.H., M.M, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung, Pustaka Setia. 2013, hlm. 71
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Kesetaraan Dan Non Diskriminasi Di Tempat Kerja Di Indonesia : Panduan* (Jakarta: Kemenakertrans, 2015). hlm. 1.
- Handoko, T. Hani. 2008. *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Veithzal Rivai. 2009. *Islamic Human Capital*. Jakarta: Rajawali Pers. hal. 192
- Robert L. Mathis &John H Jackson. 2009.*Human Resource Management*. Jakarta : Salemba Empat. hal 228.
- Hardijan Rusli. 2003. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta :Ghalia Indonesia. Hlm 12-13
- Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Prof. Dr. Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2014. Hlm 50



B. Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

## INTERNET

KBBI, <https://kbbi.web.id/globalisasi>

Badan Pusat Statistik, Jumlah Pendudukan Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2022-2023 diakses pada 07 Agustus 2023 <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>

Rekomendasi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms\\_149908.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_149908.pdf)

Adi Ahdiat, *Indonesia Punya Pengidap HIV Terbanyak di Asia Tenggara* <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/22/indonesia-punya-pengidap-hiv-terbanyak-di-asia-tenggara#:~:text=%22Jumlah%20infeksi%20HIV%20baru%20di,1%2F9%2F2022>). Diakses pada 20 September 2023

Hafiz Surahman, S.Farm, *Mengenal Dolutegravir Obat Antiretroviral Yang Menjadi Pilihan Utama*

*Pengobatan Pasien HIV Saat Ini* [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/87/mengenal-dolutegravir-obat-antiretroviral-yang-menjadi-pilihan-utama-pengobatan-pasien-hiv-saat-ini](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/87/mengenal-dolutegravir-obat-antiretroviral-yang-menjadi-pilihan-utama-pengobatan-pasien-hiv-saat-ini) Diakses pada 04 Oktober 2023

Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM., MARS, *Laporan Eksekutif Perkembangan HIV AIDS dan Penyakit*

*Infeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan I Tahun 2022*

[https://siha.kemkes.go.id/portal/files\\_upload/Laporan\\_TW\\_1\\_2022.pdf](https://siha.kemkes.go.id/portal/files_upload/Laporan_TW_1_2022.pdf). Diakses pada 04 Oktober 2023

Cindy Mutia Annur, Laki-Laki Mendominasi Jumlah Kasus HIV dan AIDS di Indonesia pada 2022

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/03/laki-laki-mendominasi-jumlah-kasus-hiv-dan-aids-di-indonesia-pada-2022#:~:text=Menurut%20laporan%20Badan%20Narkotika%20Nasional,dan%20AIDS%20di%20Tanah%20Air> diakses pada 07 Desember 2023

Dr. Fadhli Rizal. *HIV dan AIDS* <https://www.halodoc.com/kesehatan/hiv-dan-aids> diakses pada 22 September 2023

2023

Aqida Swamurti, *Survei: Perusahaan Indonesia Tolak Pekerja HIV/AIDS*

<https://nasional.tempo.co/read/149225/survei-perusahaan-indonesia-tolak-pekerja-hiv-aids> diakses pada 20

September 2023

Nurmayanti, Jakarta akan tetap Jadi Kota Bisnis Saat Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5370359/jakarta-akan-tetap-jadi-kota-bisnis-saat-ibu-kota-negara-pindah-ke-kalimantan> diakses pada 28

April 2024

Noorma Amalia Siregar, 5 Kota dengan Tingkat Seks Bebas Tertinggi, Jakarta Nomor Berapa? <https://herstory.co.id/read88108/5-kota-dengan-tingkat-seks-bebas-tertinggi-jakarta-nomor-berapa?page=2> diakses pada 10 Mei 2024

Tim CNN Indonesia, Terbanyak Hingga 2022, Angka HIV Di Jakarta Nyaris 100 Ribu Kasus <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20231201140022-255-1031556/terbanyak-hingga-2022-angka-hiv-di-jakarta-nyaris-100-ribu-kasus#:~:text=Jakarta%2C%20CNN%20Indonesia%20%2D%2D,hampir%20menembus%20angka%20100%20ribu> diakses pada 28 April 2024

Sekretariat KADIN Indonesia, Tak Lagi Ibu Kota, Jakarta Akan Tetap Menjadi Pusat Ekonomi Nasional <https://kadin.id/kabar/tak-lagi-ibu-kota-jakarta-akan-tetap-menjadi-pusat-ekonomi-nasional/> diakses pada 28 April 2024

Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H *Pancasila sebagai Sumber Hukum Tertinggi di Indonesia* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pancasila-sebagai-sumber-hukum-lt5cddb96764783/> diakses pada 20 Maret 2024

HUMAS MKRI, Membahas perkembangan Hukum Ketenagakerjaan <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18910&menu=2> diakses pada 20 Maret 2024

Tim Editor, Makna Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 Tentang Pekerjaan dan Penghidupan Yang Layak <https://kumparan.com/berita-hari-ini/makna-pasal-27-ayat-2-uud-1945-tentang-pekerjaan-dan-penghidupan-yang-layak-1vm6VM5o7wX/full> diakses pada 01 April 2024

Renata Christha Auli, S.H 8 Prinsip dan Sifat Hak Asasi Manusia Beserta Penjelasannya <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sifat-hak-asasi-manusia-lt62ff47f03be06/> diakses pada 28 April 2024

Utami Argawati, Perlindungan Hak Konstitusional Pekerja <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18683&menu=2> diakses pada 01 April 2024

Renata Christha Auli, S.H. Catat! Ini 21 asas hukum dan 7 adagium hukum yang perlu dipahami <https://www.hukumonline.com/klinik/a/catat-ini-21-asas-hukum-dan-7-adagium-hukum-yang-perlu-dipahami-lt62d0b0c23e38e/> diakses pada 15 Mei 2024

Tim Hukumonline, Makna *Equality Before the Law* dan Penerapannya <https://www.hukumonline.com/berita/a/makna-equality-before-the-law-dan-penerapannya-lt61a6d5afef049/?page=1> diakses pada 26 Desember 2023

Daniel Mulia Djati, Dkk Penafsiran Asas Kepastian Hukum dan Kekosongan Hukum Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/download/22936/10935#:~:text=Kekosongan%20hukum%20merupakan%20suatu%20keadaan,dalam%20situasi%20dan%20keadaan%20tertentu.> Diakses pada 21 Mei 2024

Valerie Augustine Budianto, S.H., 3 Asas Hukum: *Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior* beserta contohnya <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/>

Si Pokrol, Affirmative Action <https://www.hukumonline.com/klinik/a/affirmative-action-cl6904/> diakses pada 21 Mei 2024

Kantor ILO Jakarta, Kesempatan dan Perlakuan yang Sama Dalam Pekerjaan di Indonesia [https://webapps.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_122029.pdf](https://webapps.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_122029.pdf) diakses pada 08 Mei 2024

- Titon Slamet Kurnia, Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1212/51> diakses pada 15 Mei 2024
- Disampaikan oleh Ibu Lusiani Julia Melalui Webinar Diskriminasi Berbasis Gender di Tempat Kerja, diselenggarakan oleh UNAIDS dan ILO pada tanggal 16 September 2021.
- diselenggarakan oleh UNAIDS dan ILO pada tanggal 16 September 2021.
- <https://kbbi.web.id/calon> diakses pada 01 Januari 2024
- Indra, Setiawan Fuad, dkk Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rekrutmen Asisten Laboratorium, Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi, Yogyakarta 2012  
[https://journal.uui.ac.id/Snati/article/download/557/2677/3580#:~:text=Menurut%20Henry%20Simamora%20\(1997%3A212,yang%20diidentifikasi%20dalam%20perencanaan%20kepergawain](https://journal.uui.ac.id/Snati/article/download/557/2677/3580#:~:text=Menurut%20Henry%20Simamora%20(1997%3A212,yang%20diidentifikasi%20dalam%20perencanaan%20kepergawain) diakses pada 01 Januari 2024
- Payaman Simanjuntak, Undang-Undang yang Baru tentang Ketenagakerjaan [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_120052.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_120052.pdf) diakses pada 25 Desember 2023
- Muhamad Reza Sulaiman, Stigma Sosial Buat ODHA Sulit Dapat Pekerjaan <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3084940/stigma-sosial-buat-odha-sulit-dapat-pekerjaan> diakses pada 28 Desember 2-23
- Admin Gajimu.com, Organisasi Pengusaha <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/kebebasan-berserikat/organisasi-pengusaha> diakses pada 15 Mei 2024
- Y. T. Gunawan, I. Prasetyowati, and M. Ririanty, “Hubungan Karakteristik ODHA Dengan Kejadian Loss to Follow Up Terapi ARV Di Kabupaten Jember,” J. IKESMA, vol. 12, no. 1, pp. 53–64.  
[https://karya.brin.go.id/id/eprint/16976/3/Jurnal\\_Aden\\_Binus\\_2022.pdf](https://karya.brin.go.id/id/eprint/16976/3/Jurnal_Aden_Binus_2022.pdf)
- dr. Sienny Agusti, 3 cara Penularan HIV ke Dalam Tubuh <https://www.alodokter.com/ini-cara-penularan-hiv-yang-penting-diketahui> diakses pada 22 September 2023  
<https://redlineindonesia.org/elementor-3940/>
- Dr. Erna Mulati, MSc., CMFM Pedoman Program Pencegahan Penularan HIV, Sifilis dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak
- Mitra Keluarga, Ketahui Perbedaan HIV dan AIDS, serta Cara Pengobatannya <https://www.mitrakeluarga.com/artikel/perbedaan-hiv-dan-aids> diakses pada 25 Desember 2023
- Tim Medis Siloam Hospitals, *Jenis-Jenis Sel Darah Putih pada Hasil Tes Laboratorium* <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/jenis-sel-darah-putih> diakses pada 22 September 2023
- dr. Sienny Agusti, 3 cara Penularan HIV ke Dalam Tubuh <https://www.alodokter.com/ini-cara-penularan-hiv-yang-penting-diketahui> diakses pada 22 September 2023
- Admin Disnaker, Pengertian Angkatan dan Tenaga Kerja <https://disnaker.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-angkatan-dan-tenaga-kerja-34> diakses pada 21 April 2024

Kurnia Elma Armavillia, Usia 45-49 Tahun Mendominasi Angkatan Kerja Indonesia 2023

[https://data.goodstats.id/statistic/elmaarmavillia/usia-45-49-tahun-mendominasi-angkatan-kerja-indonesia-2023-](https://data.goodstats.id/statistic/elmaarmavillia/usia-45-49-tahun-mendominasi-angkatan-kerja-indonesia-2023-MXZE3#:~:text=Dilansir%20dari%20data%20BPS%20mengenai,juta%20orang%20pada%20Februari%202023)

[MXZE3#:~:text=Dilansir%20dari%20data%20BPS%20mengenai,juta%20orang%20pada%20Februari%202023](https://data.goodstats.id/statistic/elmaarmavillia/usia-45-49-tahun-mendominasi-angkatan-kerja-indonesia-2023-MXZE3#:~:text=Dilansir%20dari%20data%20BPS%20mengenai,juta%20orang%20pada%20Februari%202023). Diakses pada 22 September 2023

Yulaika Ramadhani, Diskriminasi dan Stigma Negatif Penderita HIV/AIDS di Tempat Kerja <https://tirto.id/diskriminasi-dan-stigma-negatif-penderita-hiv-aids-di-tempat-kerja-dd6b> diakses pada 28 April 2024

Vika Azkiya Dhini, Kemenkes: Pengidap Kasus HIV Mayoritas Usia Produktif <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/29/kemenkes-pengidap-kasus-hiv-mayoritas-usia-produktif> diakses pada 24 Desember 2023

Rokom, Menkes: Infeksi Menular Seksual termasuk HIV Banyak Terjadi pada Kelompok Produktif <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20131130/599508/menkes-infeksi-menular-seksual-termasuk-hiv-banyak-terjadi-pada-kelompok-produktif/> diakses pada 23 Desember 2023

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Rekomendasi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms\\_149908.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_149908.pdf)

[https://webapps.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms\\_203601.pdf](https://webapps.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_203601.pdf)

Konten Media Partner Pandangan Jogja, 131 Anak di DIY Idap HIV AIDS, Ada yang Ditolak Posyandu hingga Panti Asuhan <https://kumparan.com/pandangan-jogja/131-anak-di-diy-idap-hiv-aids-ada-yang-ditolak-posyandu-hingga-panti-asuhan-20nPOhdhR4z/full> diakses pada 31 Desember 2023

Media\_cpps, Perlindungan Sosial bagi Pekerja dengan HIV/AIDS <https://cpps.ugm.ac.id/publication/perlindungan-sosial-bagi-pekerja-dengan-hiv-aids/> diakses 25 Desember 2023

Nursalam, dkk Perilaku Diskriminasi yang Diterima oleh ODHA di Indonesia <https://unair.ac.id/perilaku-diskriminasi-yang-diterima-oleh-odha-di-indonesia/> diakses pada 28 Desember 2023

Dhifana Iftininan Maitsa, dkk, Diskriminasi yang Dialami Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) Dampingan Yayasan Sehat Panghuripan Sukowati Kabupaten Sragen

<https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/ijsw/article/download/342/ijsw-0402/986> diakses pada 28 Desember 2023

Agus Luqman, Sulit Cari Kerja, ODHA di Kupang Minta Bantuan Modal Usaha [https://kbr.id/tag/nusantara/10-2015/sulit\\_cari\\_kerja\\_odha\\_di\\_kupang\\_minta\\_bantuan\\_modal\\_usaha\\_/76410.html](https://kbr.id/tag/nusantara/10-2015/sulit_cari_kerja_odha_di_kupang_minta_bantuan_modal_usaha_/76410.html) diakses pada 28 Desember 2023

Tim Hukumonline, Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/> diakses pada 12 Mei 2025

Hasan Ramadhan, Perempuan Lebih Rentan Tertular HIV/AIDS <https://www.jurnalperempuan.org/perempuan-lebih-rentan-tertular-hiv-aids.html?locale=en> diakses pada 21 April 2024

Health and Medical Management, PT. Pertamina (Persero)

- [https://webapps.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms\\_203601.pdf](https://webapps.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_203601.pdf)
- Naskah Rekomendasi tentang HIV dan AIDS dan Dunia Kerja, 2010 (No. 200) <https://www.ilo.org/id/publications/naskah-rekomendasi-tentang-hiv-dan-aids-dan-dunia-kerja-2010-no-200?lang=id>
- Administrator, Penyintas HIV/AIDS sering mendapat perlakuan diskriminatif <https://ugm.ac.id/id/berita/18886-penyintas-hiv-aids-sering-mendapat-perlakukan-diskriminatif/> diakses pada 16 Mei 2024
- Hreeloita Dharma Shanti, JIP: Diskriminasi jadi penyebab sulitnya atasi HIV di Indonesia <https://www.antaraneews.com/berita/2556309/jip-diskriminasi-jadi-penyebab-sulitnya-atasi-hiv-di-indonesia> diakses pada 16 Mei 2024
- <https://www.ilo.org/id/media/286836/download> diakses pada 19 Mei 2024
- Dr. Hendra Gunawan SpPD, Kontrol pasca pemberian ARV sebaiknya berapa bulan sekali? <https://www.alomedika.com/komunitas/topic/kontrol-pasca-pemberian-arv-sebaiknya-berapa-bulan-sekali#:~:text=Untuk%20pemeriksaan%20laboratorium%20seperti%20HIV,pe ngobatan%20dilakukan%20untuk%20mengevaluasi%20pengobatan.> Diakses pada 21 Mei 2024
- Admin, Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/> diakses pada 22 Mei 2024
- Utami Puspaningsih, Tiga Aliran Konvensional tentang Tujuan Hukum <https://mail.pa-sidikalang.go.id/index.php/publikasi/arsip-artikel/723-tiga-aliran-konvensional-tentang-tujuan-hukum> diakses pada 22 Mei 2024
- Saufa Ata Taqiyya, S.H. 3 Kewajiban Pokok Negara dalam Hukum HAM Internasional <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-kewajiban-pokok-negara-dalam-hukum-ham-internasional-lt62611e31941a4/> diakses pada 24 Mei 2024

#### **BAHAN LAIN**

- Wiebke Duvel, Non-discrimination in the European Union Implementation of Directive 2000/78/EC PART II Age and disability, Brussels, 2004
- Elly Erawaty, Bahasa Indonesia dan Kemahiran Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, hlm. 10 (tidak dipublikasikan)
- Majalah Kedokteran Indonesia Hal 191-194 (PDII-Jakarta)
- Haiyani Romondang, dkk. Modul Pembelajaran Daring Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS di Tempat Kerja
- Uli Parulian Sihombing, Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama Memahami Diskriminasi